

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA

- ALIMBANG :**
- Bulowa sebagai tidak lengkap dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dan Kependidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/D/1993 tentang Sekolah Lanjut Tingkat SLTP;
 - Bulowa sebagai tidak lengkap dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/D/1997 tentang Peraturan Nasionalisasi SMP menjadi SLTP serta Organisasi Tata Kerja SLTP;
 - Bulowa sebagai tidak lengkap dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/D/1997 tentang Sekolah Lanjut Tingkat SLU serta Organisasi Tata Kerja SLU;
 - Bulowa dianggap perlu memperbaiki d. n. segera operasional Ibu Operasional Sekolah Swasta diwakilkan Bulan Dikemas Kimia Wilayah Agung-Band Provinsi Sumatra Utara

- MITIGASAT :**
- U.U Nomor 2 tahun 1990;
 - PP Nomor 28 tahun 1992;
 - PP Nomor 28 tahun 1998;
 - PP Nomor 29 tahun 1990;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - Nomor 004/D/1994, tanggal 12 Juli 1994;
 - Nomor 048/VL/1992, tanggal 30 Nopember 1992;
 - Nomor 054/U/1997, tanggal 22 Februari 1997;
 - Nomor 445/MK.A.2/KP/1996, tanggal 18 Maret 1996;
 - Nomor 034/D/1997, tanggal 2 Maret 1997;
 - Nomor 035/D/1997, tanggal 3 Maret 1997.
 - Keputusan Direktur Jenderal Dikti-Menteri Depdikbud Nomor 918/Ckp/5/1983 tanggal 23 Februari 1983

M E M U T S I K A N

MENETAPKAN :	
Portama :	1. Nama Sekolah : SLTP Swasta HK BINTANG SUMOSIR
	2. Alamat Sekolah : Palipi
	3. Kecamatan : Palipi
	4. Kecamatan/Kota/kota : Tapauhi Ul. n
	5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Katolik Santo Laurentius
	6. Alamat Yayasan : Jl. Sibulga no. 17 Pematangsiantar

atau
Ketiga
Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatra Utara pada tahun 1993
Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Menyediakan mutu pendidikan setara dengan lembaga yang berlaku;
- Mengingkatkan kapasitas belajar dan kipasias insyah teladan ke Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatra Utara Bidang Dikmas;
- Menatakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatra Utara;
- Berat Kepatuhan ini tidak berlaku dalam kasus kejadian peristiwa penghalangnya sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga
1. Kepatuhan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan;

2. Apabila ketentuan pada batas 2 dan 3 dikhianati ketiga tersebut di atas tidak diizinkan maka surat keputusan ini dimuatkan batas;

Kelima : Meminta maaf Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatra Utara
nomor : 308/105/A.1986 tanggal 12 Desember 1986.

Kelima : Apabila terdapat ketidakcocokan dalam perintegritas atau dicatutkan perintegritas-

Ditetapkan di : Medan

25 SEP 1997



A. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
B. KANTOR WILAYAH
C. DEPARTEMEN
D. PENGETAHUAN
E. SUMATERA UTARA